

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam penelitian ini tema yang saya angkat yaitu mengenai “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Untuk Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat.” fokus utama penelitian ini bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan atau peran masyarakat dalam pembangunan dari kesediaan atau kemampuan anggota masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan. Sebab, Peningkatan masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan. Dan lokus utamanya adalah di Desa Simbara Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pada hakekatnya Pembangunan adalah proses yang berkelanjutan ataupun berkesinambungan dalam tujuan mewujudkan kesejahteraan yang ditandai dengan peningkatan taraf hidup (standard of living). Sebagaimana tujuan Negara Indonesia dalam menyelenggarakan pembangunan tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional dianggap berhasil ketika pembangunan di tiap sudut desa segera direalisasikan. Sebab, sebelum mencapai nasional sikap utama dalam suatu negara adalah

meninjau hal yang kecil seperti pembangunan di desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Dalam menyelenggarakan tujuan pembangunan maka seluruh potensi harus dikembangkan, seperti potensi manusia berupa penduduk yang harus ditingkatkan pengetahuannya dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan tercapainya pelaksanaan program tersebut.

Agar tercapainya pelaksanaan program pembangunan tersebut, hal yang paling dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik. Selain partisipasi aktif dari masyarakat ternyata peran pemerintah juga diperlukan untuk mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan memberikan anggaran sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, maka daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan di segala bidang dalam pembangunan daerah, karena semuanya menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaan sepenuhnya kepada daerah, terutama kabupaten dan kota sebagai titik terberat dari otonomi daerah itu sendiri. Tujuan memberikan otonomi ini adalah agar pelaksanaan pembangunan di daerah efektif lebih terjamin perkembangannya yang dilaksanakan bersama-sama dengan asas desentralisasi.

Maka hal demikian, asas dekonsentrasi bukan sekedar kelengkapan terhadap asas desentralisasi, melainkan memiliki kepentingan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Aplikasi kesadaran berpartisipasi tersebut dapat terjadi (*step-in*), baik dalam landasan desentralisasi maupun dekonsentrasi yang berlangsung melalui dua arah arus, yaitu pertama proses "dari atas ke bawah" (*top down planning*) yang berarti kebijakan ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan pendekatan wilayah untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pembangunan. Kedua, proses "dari bawah ke atas" (*bottom up planning*) dalam arti datangnya rencana, program dan kegiatan berasal dari aspirasi serta keinginan "bawah".

Namun demikian, partisipasi dalam kerangka arus dari atas (*top down*) seringkali melahirkan partisipasi yang artifisial dan cenderung bersifat mobilisasi. Keterlibatan masyarakat hanya dijadikan sebagai pelengkap, bukan yang utama. Partisipasi dipahami sebagai suatu kewajiban, bukan hak. Memang ada manfaatnya dari segi efisiensi waktu dan upaya pemaksaan substansi, pendekatan yang top down ini lebih efektif, cepat dan ampuh. Namun dari segi daya terima (*acceptability*) oleh masyarakat dapat dikatakan diragukan keandalannya (*unreliable*). Oleh karena itu dalam batas-batas tertentu, pendekatan top down dapat pula didayagunakan sepanjang tidak berkenaan dengan hal-hal yang mendasar dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sebaliknya, pendekatan *bottom up* yang dengan keterlibatan masyarakat, memiliki daya dukung dan sokongan yang amat kuat. Hal ini dapat dimengerti dan dipahami karena sejatinya masyarakat telah menentukan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya.

Maka dari itu, Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan daerah, karena pada kenyataannya potensi pembangunan daerah dapat menjadi andalan dalam pelaksanaan pembangunan, dan dapat mempercepat pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pada masyarakat perdesaan. wilayah desa merupakan sasaran penyeleleengraan aktivitas pemerintah dalam pembangunan, melihat kondisi desa merupakan basis pemerintah terendah dalam struktur pemerintah untuk menentukan tercapainya dalam menghasilkan pembangunan nasional yang menyeluruh.

Berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka tujuan diberlakunya Undang-undang tentang pemerintah daerah yang menjadi acuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pemerintah sebagai pemberi layanan dan masyarakatnya sebagai penerima layanan, serta melibatkan masyarakat untuk berperan aktif yakni berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, baik dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan proses.

Pembangunan desa adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup yang layak. Sehingga pembangunan desa perlu mendapatkan perhatian lebih dari setiap kalangan masyarakat dan pemerintah. Hal ini tentu bukanlah merupakan sesuatu yang mudah untuk dilalui tanpa proses yang sudah sangat matang dan tertata rapi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 78 dijelaskan mengenai pembangunan desa yaitu Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta Pemanfaatan hasil sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dan Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Untuk melakukan kebijakan tersebut adalah melalui pengembangan program pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat pembangunan perdesaan .

Keberhasilan pembangunan desa yang berlangsung di desa itu sendiri di tentukan oleh partisipasi masyarakat juga nilai-nilai tradisional yang mendasari keterlibatan masyarakat sebagai potensi yang dapat digerakan dalam pembangunan melalui strategi manajemen yang sesuai. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu daerah, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari penduduk yang berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien dan maksimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian setiap pengelolaan pembangunan membutuhkan suatu penataan dan pengaturan yang teliti dan seksama sejak awal. Teliti dan seksama dalam arti mampu memperhitungkan dan mengantisipasi segala aspek yang berkaitan dengan kelancaran proses pembangunan secara menyeluruh. Terutama aspek-aspek yang sedini mungkin patut di duga dapat mempengaruhi atau menimbulkan hambatan pelaksanaan dari tujuan pembangunan itu sendiri atau akan terjadi penyimpangan secara tidak terkendali dari rencana yang telah ditetapkan.

Tingkat kemampuan kepala desa juga sangat dibutuhkan untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka dapat termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan masyarakat dalam memberikan solusi atau saran untuk keberlangsungan pembangunan . Kemampuan kepala desa dan perangkat desa harus memiliki bentuk kewibawaan tertentu untuk wewenang dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan keahlian profesinya serta dengan beragam strategi manajemen untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi desa .oleh sebab itu pemimpin desa harus memiliki tingkat wawasan dan tanggung jawab yang penuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai kepala desa dapat berjalan dengan baik .paradigma pembangunan yang sangat dikembangkan sekarang ini adalah paradigma pemberdayaan yang berintikan partisipasi masyarakat.Masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utamalagi sebagai provider, tetapi lebih bertindak sebagai intermediasi dan katalisator segenap perencanaan pembangunan.Artinya pemerintah seharusnya memberikan kepercayaan dan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat, didalam menumbuh kembangkan segala potensi yang dimilikinya bersama dengan lingkungannya. Dengan kata lain bagaimana mengkondisikan agar pembangunan menjadi bagian integral dari rakyat, sehingga mereka berperan sebagai subyek pembangunan yang dominan menentukan keberhasilan pembangunan

Pemberdayaan masyarakat Desa menurut UU RI Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa,disebutkan dalam BAB 1 Nomor 12 yang isinya pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap,keterampilan,perilaku,kemampuan ,kesadaran serta memanfaatkan

sumberdaya melalui penetapan kebijakan,program, kegiatan ,dan pendampingan yang sesuai esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa.pengertian pendampingan adalah untuk memfasilitasi,serta memberikan dorongan motivasi terhadap masyarakat agar sesuai dengan setiap kegiatan tujuan yang dikehendaki .dalam kebijakan pembangunan Desa, partisipasi masyarakat adalah salah satu kunci untuk keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan perdesaan pada masyarakat itu sendiri.

Dalam penelitian terdahulu Purwaningsih juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai nilai yang sangat murni dalam menjalankan system pemerintahan yang model bottom-up playning sangat penting untuk berpartisipasi dalam menjalankan pembangunan. pelaksanaan pembangunan ini merupakan sebagai sebuah nilai kewujudan dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan, potensi dan sesuai dengan wilayahnya dalam merencanakan pembangunan di tingkat desa untuk pemberdayaan masyarakat secara kesinambungan. bukan hanya dalam bentuk fisik namun nilai pendidikan dan pengetahuan, dan kondisi geografis keadaan desa juga mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dan kerlibatan masyarakat. Maka oleh karena itu, peranan pemerintah desa sebagai elit dalam pembangunan desa harus menjadi perhatian pemerintah desa dalam memajukan desa secara kesinambungan harus menempatkan tugas hak dan kewajiban kepentingan masyarakat.¹

Dengan demikian partisipasi masyarakat dan peran serta disini bukan berarti masyarakat itu hanya berfungsi sebagai memberikan dukungan dan keikutsertaan tetapi menikmati hasil –hasil pembangunan itu sendiri .Pembangunan partisipatif harus dimulai dengan masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang kebutuhannya sehingga tidak menimbulkan konflik dalam desa tersebut.untuk menumbuhkan penggerakan semangat partisipasi dibutuhkan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat . sebagaiMasyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah daerah harus dapat memposisikan

¹ Nellis Maradhiah, **Identifikasi Tujuan Dan Sasaran Pembangunan** , Jurnal Public policy, Aceh: 2008, hal. 03 diakses tanggal 15 Mei 2020

diri sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan desa. Intensitas dan bentuk partisipasi masyarakat harus ikut partisipasi dalam pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring, dan pemanfaatan hasil/pengawasan. tingkat partisipasi pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan program pembangunan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan program tersebut. Partisipasi masyarakat sebagai masukkan dalam pembangunan agar diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa. kegiatan partisipasi masyarakat meliputi identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. salah satu faktor yang menentukan terlaksananya pembangunan adalah faktor manusia yang artinya timbulnya kemampuan. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam setiap tahapan pembangunan dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan hasil. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikutserta keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. hal ini memberi arti bahwa masyarakat harus bersedia berperan aktif dalam setiap kegiatan yang terjadi di masyarakat itu sendiri untuk pembangunan, sedangkan pemerintahan hanya memberikan pengarah bimbingan, tenaga, keahlian, materi dan bantuan dana sebagai kelancaran pembangunan. Dengan demikian sudah seharusnya apabila masyarakat berpartisipasi aktif dan mendukung, mengembangkan dan meningkatkan pembangunan desa yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program-program pembangunan

desa, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat akan dapat diperoleh jika program-program dalam pembangunan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Selanjutnya dapat dipastikan pula bahwa tujuan pembangunan akan tercapai pula. partisipasi masyarakat dengan adanya komunikasi yang baik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Komunikasi yang bersifat dialogis, berbasis kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, yang menempatkan komunikator dan komunikan dalam posisi yang sama sebagai subyek, akan meningkatkan keterlibatan mental/emosional, kontribusi dan tanggung jawab dalam pembangunan.

Kelompok swadaya desa harus diperhatikan terkait dengan banyaknyapersoalan yang sedang terjadi di masyarakat , apalagi masyarakat sekarang ini semakin kritis ,yang menuntut adanya perbaikan disegala bidang termasuk ekonomi, sosial, budaya. Kelompok swadaya harus dapat lebih banyak memberikan pendapat sebagai wakil intelektual masyarakat yang terorganisir ,guna sebagai wadah menampung dan menjalankan keinginan masyarakat utamanya mengawasi pembangunan di desa . salah satu arti yang penting dari keberadaan desa adalah bahwa desa memiliki apa yang disebut sebagai “Hak Otonomi” yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri bedasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Adanya pemberian otonomi desa tersebut, berkonsekuensi pula pada pemerintahan daerah diberi kewenangan yang besar dalam mengatur daerahnya termasuk yang berkaitan dengan fiskal. Kebijakan ini paling tidak akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu, pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh

daerah. Kedua, memperbaiki sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintah yang lebih rendah.

Infrastruktur jalan di Kecamatan Tarabintang , Kabupaten Humbang Hasundutan sangat memprihatinkan. , jalan menuju Desa Siantar Sitanduk, Desa Mungkur dan Desa Simbara diketahui kondisinya sangat tidak layak sehingga sangat membutuhkan perhatian dan pemerintah setempat.

Salah satu pembangunan yang diadakan di Desa Simbara Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan saat ini yakni pembangunan Pengerasan jalan usaha tani Sirintua (Telfort) 1 km. tidak terlepas dalam pembangunan, partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk pembangunan tersebut berupa sumbangan tenaga, pemikiran, dan lain-lain untuk mencapai keberhasilan pembangunan desa.

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa pelaksanaan pembangunan desa masih kurang karena partisipasi masyarakat masih belum berjalan dengan optimal karena tidak adanya dukungan masyarakat pada pembangunan setempat dalam melakukan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan desa tidak sesuai dengan yang diharapkan .Partisipasi masyarakat Desa Simbara relatif bervariasi baik dari segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya. Dari segi intensitasnya ada yang partisipasinya sangat rendah, dan ada pula yang sangat tinggi. Dan dari segi bentuknya ada yang partisipasinya dalam bentuk pemikiran/ide, dan ada pula yang partisipasinya dalam bentuk materi dan uang tunai dan masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dalam menyalurkan aspirasinya melalui lembaga –lembaaga yang ada di desa.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan sampai Evaluasi pembangunan . Untuk itu penulis menetapkan judul **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Untuk Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Simbara, Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan)**.

1.2. Rumusan Masalah

Setiap penelitian yang dilakukan harus berangkat dari masalah. Masalah penelitian adalah masalah atau isu yang menjadi sebab adanya penelitian. Masalah merupakan kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang terjadi . Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melihat pengumpulan data.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas ,maka dapat dirumuskan fokus permasalahan adalah :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Simbara , Kecamatan Tarabintang , Kabupaten humbang Hasundutan ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Simbara , Kecamatan Tarabintang , Kabupaten Humbang Hasundutan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran secara deskriptif mengenai peranan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Simabara , Kecamatan Tarabintang , Kabupaten Humbang Hasundutan .

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Simabara ,

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat kepada pihak secara umum yaitu:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan, dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan metodologi serta memiliki kemampuan dan menganalisis setiap gejala dan permasalahan dilapangan terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Untuk Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.

2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini agar menjadi informasi bagi masyarakat tentang bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Untuk Untuk Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat .

3. Bagi Akademik

Untuk memperkaya bahan referensi penelitian di bidang Ilmu Sosial Politik. Terkhusus bagi program studi Ilmu Administrasi Negara dan dapat acuan ataupun bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Tujuan dan Manfaat penulisan, serta Sistematika penulisan .

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisikan tentang Partisipasi, Pembangunan Desa, Kesejahteraan masyarakat

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktudan tempat penelitian, dan prosedur analisis data.

BAB IV DESKRPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan lokasi penelitian di Desa Simbara Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini Bagian ini berisi analisis dari hasil observasi dan pembahasan wawancara tentang Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Untuk Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan

BAB II

KERANGKA TEORI

Setelah masalah perumusan dilakukan salah satu unsur yang paling penting peranannya adalah menyusun landasan teori , konsep- konsep dan generalisasi –generalisasi karena semua dari itu untuk menggambarkan dari segi mana peneliti meyoroti masalah yang telah terpilih .

Menurut Sugiyono , teori adalah seperangkat konstruk (konsep), asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi.²

2.1. Teori Partisipasi

2.1.1. Pengertian partisipasi

Hasil yang diharapkan dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung disetiap program kebijakan pemerintah melalui melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk jangka yang lebih panjang.

partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan serta suatu proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.

Secara etimologi kata Partisipasi menurut Seokanto dalam Ngusmantomenyimpulkan bahwa, Partisipasi adalah pinjaman dari bahasa belanda “*participatie* “,yang sebenarnya dari bahasa latin

² Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D**, Bandung: Alfabeta. 2012, Hal. 52

“*participation*” terdiri dari 2 kata yaitu “*part*” yang berarti bagian , dan “*capere*” yang berarti mengambil bagian selanjutnya , kata “*participation*” itu sendiri berasal dari kata kerja “*participate*” yang berarti ikut serta . jadi Partisipasi mengandung pengertian aktif yakni adanya kegiatan atau aktivitas.³

Seorang ilmuwan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi da sebagai berikut, “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok.”⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut , maka ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi yaitu:

1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota⁵.

partisipasi mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan.
2. Menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya.
3. Partisipasi berarti terwujudnya kreativitasnya dan oto aktifitas.

Tjokrowinoto dalam ngusmanto mengemukakan bahwa partisipasi secara aktif dalam pembangunan di lingkungan masyarakat pedesaan sangat dibutuhkan bahkan sudah menjadi mitos dari pembangunan itu sendiri, sehingga hampir semua Negara mengumumkan secara luas kebutuhan partisipasi dalam semua proses pembangunan.⁶

³Ngusmanto ,**Administrasi Pembangunan**, Jakarta : Mitra Wicana, 2015, hal. 132

⁴**Ibid**, hal.132

⁵**Ibid**, hal. 139

⁶**Ibid**, hal. 133

Karakteristik dari partisipasi ini adalah semakin bagus jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Karena itu, partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing- masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

Menurut Sundariningrum dalam Sofia mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

1. Partisipasi langsung
Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
2. Partisipasi tidak langsung
Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.⁷

2.1.2. Unsur-Unsur Partisipasi

Beberapa unsur penting yang mencakup dalam pengertian partisipasi, diantaranya: Pertama: dalam partisipasi yang ditelaah dilakukan bukan hanya keikutsertaan secara fisik tetapi juga fikiran dan perasaan (mental dan emosional). Kedua: partisipasi dapat digunakan untuk memotivasi seseorang yang menyumbangkan kemampuannya kepada situasi kelompok sehingga daya kemampuannya berfikir serta inisiatifnya dapat timbul dan diarahkan kepada tujuan kelompok. Ketiga: dalam partisipasi mengandung pengertian orang untuk ikut serta dan bertanggungjawabkan dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Partisipasi mempunyai tiga unsur yaitu: keikutsertaan sesungguhnya merupakan

⁷Sofia, **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/16194/15698>. 2013, hal.04 . diakses tanggal 15 Mei 2020

keterlibatan mental dan perasaan, ada rasa senang dan sukarela untuk membantu kebanyakan orang serta ada rasa tanggungjawab. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi rasa keterlibatan psikologis dengan tugas yang diberikan kepadanya, semakin tinggi pula rasa tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas tersebut. Terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan partisipasi seseorang sebagai berikut:

1. Partisipasi seseorang merupakan satu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikapnya suatu program .
2. Seseorang akan lebih mengetahui selu belu suatu program dan akan mempunyai rasa memiliki program tersebut .
3. Partisipasi merupakan hak demokrasi bila seseorang bila dilibatkan.

Menurut Davis dalam Ngusmanto mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Pikiran (*Psychological participation*).
2. Tenaga (*Physical participation*).
3. Pikiran dan tenaga (*Psychological dan Physical participation*).
4. Keahlian (*Participation with skill*).
5. Barang (*Material participation*).
6. Uang (*Money participation*)⁸.

Bentuk partisipasi adaberbagai macam dari segi partisipasi dalam bentuk tenaga , Partisipasi dalam bentuk uang , dan partisipasi dalam bentuk harta benda .

ada tiga unsur pokok tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, yaitu:

- Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
- Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi

⁸Ngusmanto, **op cit**, hal.132

- Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Tujuan alasan utama penumbuhan partisipasi adalah untuk:

1. Partisipasi merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat tanpa adanya ini maka program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek-proyek atau program-program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dari perencanaannya.
3. Adanya anggapan bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.⁹

2.1.3. Tahap-tahap dan Tingkatan Partisipasi

Sanof membagi partisipasi menjadi tiga tahapan :

1. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dan sebagai hasilnya meningkatkan kepercayaan mereka, sehingga mereka dapat menerima keputusan dan menggunakan dalam system yang telah ada ketika mereka menghadapi suatu masalah.
2. Menyalurkan suatu masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan guna meningkatkan (kualitas) dari perencanaan dan keputusannya.
3. Keterlibatan dalam memetik dan manfaat pembangunan secara bersama.¹⁰

2.1.4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu program, Timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga faktor utama yang mendukung, yaitu,

- Kemauan
- Kemampuan
- Kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi .

⁹ *Ibid*, hal. 135

¹⁰ *Ibid*, hal. 137

.Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut :

a.Faktor-faktor Internal

untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi. Sedangkan,

b.Faktor-faktor Eksternal

faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu Dalam hal ini stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.¹¹

2.2. Teori Pembangunan

2.2.1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah suatu cara dalam memperbaiki guna untuk mensejahterakan dan memakmurkan untuk kearah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dalam kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya melalui partisipasi yang diberikan berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

¹¹Ibid, Hal .140-147

Pembangunan didefinisikan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*)”.¹² Sesungguhnya proses pembangunan memerlukan keterpaduan, keserasiaan dan keselarasan dalam pembangunan dibutuhkan pendukung yaitu sumberdaya (SDM), sumberdaya alam (SDA) serta permodalan dan teknologi .

Dengan kata lain, kebijaksanaan berisi tujuan keseluruhan dan tujuan tiap program yang hendak dicapai pada tiap tahap pembangunan, cara yang perlukan dilakukan untuk mengatasi semua atau berbagai keterbatasan, rintangan-rintangan dan pertentangan yang ada atau di perkirakan akan terjadi, cara mengalokasikan sumber-sumber pembangunan yang optimal, serta cara melakukan koordinasi semua kegiatan yang efektif.

Mansour menyatakan bahwa pembangunan dapat diinterpretasikan dalam dua kategori berdasarkan pengertian yaitu : 1) Pembangunan sebagai fenomenal sosial yang mencerminkan kemajuan peradaban manusia. 2) Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan sosial yang terencana. Randy dan Nugroho memberikan definisi pembangunan secara sederhana, yaitu pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Dalam menyelenggarakan tindakan pembangunan, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai kegiatannya. Dana tersebut dihimpun dari warga Negara dalam bentuk: pajak, pungutan, serta yang di peroleh secara internal dari pendapatan bukan pajak dan laba perusahaan publik. Kesejahteraan manusia merupakan fokus dari tujuan pembangunan, motivasi pelaku pembangunan, dan prioritas pembiayaan pembangunan.¹³

2.2.2. Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pembangunan

Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendukung Koordinasi antar pelaku Pembangunan

¹²Sondang P Siagian, **Administrasi Pembangunan**, Jakarta : Bumi Aksara, 2009. Hal. 04

¹³**ibid**, hal. 126

2. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil¹⁴

2.2.3. Prinsip Penyelenggaraan Pembangunan Nasional

Kelembagaan penyelenggaran negara (dikenal sebagai sistem administrasi Negara Indonesia) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengorganisasikan tugas-tugas pembangunan.

Istilah pembangunan nasional dipergunakan oleh berbagai kelompok di masyarakat dengan berbagai persepsi dan konotasi yang berbeda-beda. Sementara warga masyarakat mungkin mempergunakan istilah tersebut hanya dalam konteks pembangunan ekonomi semata-mata. Sesungguhnya persepsi yang lebih mendekati kebenaran ialah bahwa istilah “Pembangunan Nasional” harus dilihat dalam konteks terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa dan Negara yang bersangkutan meskipun dengan skala prioritas yang berbeda dari satu Negara ke Negara lain.

Pembangunan nasional pada umumnya diselenggarakan dengan berpedoman pada beberapa prinsip yang dalam karya tulis ini penulis secara sadar dan sengaja batasi pada hanya tujuh prinsip yaitu:

¹⁴Sjafrizal, **Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi**, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Hal.26

1. Kesemestaan

Bahwa pembangunan nasional bersifat komferensif, artinya menyatukan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia.

2. Partisipasi Rakyat Betapapun kulifednya para aparat penyelenggara Negara dan matangnya program-program pembangunan direncanakan tidak akan membawa hasil optimal tanpa didukung oleh partisipasi rakyat.

3. Keseimbangan

Mengandung makna bahwa pembangunan nasional harus seimbang

4. Kontinouitas

cita-cita akhir bangsa Indonesia tidak akan tercapai dalam kurun waktu satu generasi. Hal ini berarti bahwa usaha mewujudkkan harus diperjuangkan secara terus-menerus

5. Kemandirian

pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersendikan pada kepribadian bangsa.

6. Skala Prioritas

Pelaksanaan pembangunan dibatasi oleh berbagai keterbatasan, sehingga tidak mungkin semua bidang atau masalah dilaksanakan atau ditangani dalam waktu bersama.

7. Pemerataan Disertai pertumbuhan

Pelaksanaan pembangunan yang sudah dicapai harus bisa dinikmati secara merata oleh bangsa Indonesia .

2.2.4. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan Yang Baik

Adapun ciri-ciri perencanaan yang baik yakni :

- Sempel, sederhana dan mudah dimengerti.
- Fleksibel, Rencana yang baik haruslah dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah-ubah.
- Stabil , tidsk perlu selalu mengalami perombakan dan perubahan
- Faktual , dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ada dan diselarsakan pula dengan kejadian-kejadian yang akan timbul dalam tindakan pelaksanaanya
- Rasional, dibuat atas dasar pemikiran yang sehat, ilmiah dan dapat dipertanggung-jawabkan .
- Kontinyu, dipersiapakna untuk tanda-tanda yang terus-menerus dan berkelanjutan
- Dinamis , salah satu perencanaan yang baik, apabila sifatnya dinamis, perencanaan dibuat dan dipersiapkan untuk memikirkan peningkatan perbaikan dan pemberbaharuan dalam mencapai kemajuan dan kesempurnaan pada masa yang akan datang.
- Praktis dan Pragmatis artinnya planning mampu dilakukan dan dicapai serta dapat mendukung program organisasi.
- Akurat artinnya dibuat secara terperinci dan mendetail dan dirumuskan segala aspek dalam mencapai pembangunan ,tata kerja, metode kerja, penggunaan tenaga kerja, pembiayaan, jadwal waktu, targethasil dan system pengawasan.

- Sistematis artinya suatu perencanaan itu dipandang baik apakah susunannya teratur baik

2.2.5. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan

Hal terpenting yang harus menjadi landasan pembangunan adalah menentukan peran dari pemerintah dalam membangun bersama masyarakat. Peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk sebagai berikut:

- a. Pertama, peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam pengembangan.

Kedua, timbul pengertian tentang service state, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat.

- b. Ketiga, peranan pemerintah sebagai enter preneur atau pendorong inisiatif usaha dari masyarakat. Pemerintah menjadi development agent atau unsur sebagai pembaharuan atau pembangunan.

2.3. Pengertian Pembangunan Desa

2.3.1. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa. .

Pembangunan di desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pembangunannya. Dengan demikian, kebijaksanaan pembangunan yang menyeluruh terutama pada tahap-tahap awal dengan sendirinya:

1. Pembangunan itu adalah merupakan suatu proses perubahan yang continue atau dengan istilah lain adalah melalui tahapan –tahapan
2. Disamping dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti antara lain peningkatan taraf hidup masyarakat maka kegiatan awal dimulai dengan pengembangandibidang ekonomi tanpa melakukan uaha atau kegiatan pembangunan dibidang lain.
3. Yang penting pula dalam rangka kegiatan ekonomi adalah melibatkan masyarakat.
4. Di samping itu dalam rangka pembangunan, bahwa institusi-insitusi kemasyarakatan seperti gotong royong ,permufakatan, permusyawaratan, perlu diperiksa dengan seksama untuk ahkirnya nilai-nilai positif dari institusi itu dapatdikembangkan bagi pembangunan dan kehidupan masyarakat¹⁵

Sehingga Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan didesa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat diaman pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya, gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.Khususnya pembangunan desa sudah merupakan kewajiban pemerintah pusat maupun daerah atau masyarakat desa untuk memperhatikan pembangunan dan tingkat ekonomi masyarakat,pembangunan nasional terletak pada pembangunan dari bawah yaitu desa khususnya adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila, dilakukan secara bertahap dengan sasaran yang makin meningkat.

2.3.2. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

¹⁵,Nyoman Berta, **Masyrakat Desa Dan Pembangunan Desa**, Jakarta Timu : Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 7.2

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa menurut Hawwidjaja berpendapat bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.”¹⁶

Pengertian desa secara adalah suatu daerah hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan sosial yang hidup serta tinggal menetap di suatu daerah tertentu dengan adat istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang pimpinan formil yaitu Kepala Desa . pengertian desa lebih dipersingkat yaitu sebagai daerah yang berada di luar pusat kegiatan pemerintah dari luar kota.¹⁷

2.4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

2.4.1. Perencanaan Partisipasi Pembangunan

Perencanaan partisipatif adalah paradigma alternatif dalam perencanaan yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam proses pengambilan keputusan publik. Didalamnya perencanaan dianggap sebagai arena politik masyarakat sipil bisa bernegosiasi atau berdebat dengan Negara . Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat

¹⁶ Haw. widjaja, **Otonomi Desa**. Jakarta: PT Raja Grafindo, Cetakan keenam, 2012, hal.3

¹⁷ H., Siagian, **Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa**. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1989, hal .3

yang pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*).

pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan. Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan, yaitu: Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut. Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

Sanit dalam Maripah menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan partisipasi masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika partisipasi masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan maka akan tercipta control terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik, oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi.

Menurut Davis dalam Maripah, bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu :

- Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
- Sumbangan spotan berupa uang atau barang
- Mendirikan proyek yang sifat berdirikari dari donornya berasal dari sumbangan individu / instansi (dermawan atau pihak ketiga)
- Mendirikan proyek yang sifatnya berdirikari, dan dibiayai seluruhnya oleh komuniti (biasanya diputuskanoleh rapat komuniti, anantara lain : rapat desa yang menentukan anggarannya)
- Sumbangan dalam bentuk kerja yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat .
- Aksi massa
- Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri
- Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom.

Menurut Riant Nugroho dalam Maripah proses penyusunan perencanaan baik itu jangka panjang, menengah maupun tahunan di bagi menjadi empat tahap yaitu:

1. Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan sebelumnya bertujuan untuj mendapatkan informasi tentang kapasitas lembaga pelaksana, kualitas rencana sebelumnya serta untuk memperkirakan kapasitas pencapaian kinerja dimasa yang akan datang.

2. Penyusunan Perencanaan

Penyusunan rencana terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut:

- Penyiapan rancangan pembangunan oleh lembagaperencana dan bersifat rasional, ilmiah, menyeluruh dan terukur.
- Penyiapan rencana kerja oleh lembaga-lembaga pemerintah sesuai dengan kewenagannya.

3. Penetapan Perencanaan

Penetapan rencana menjadi produk hokum sehingga mengikat semua pihak untuk melakukannya.

4. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan

Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran.tujuan dan kinerja pembanguna evaluasi dilakukan berdasarkan indicator dan kinerja mencakup input (masukkan), output (keluaran), result (hasil), benefit (keuntungan), dan impact (dampak).¹⁸

¹⁸Maripah, **Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu**, Jurnal FISIP, Vol. 4.No.2, Hal. 8

Pembangunan desa harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang dan mencerminkan segala potensi yang dimiliki oleh desa dan harus merupakan titik temu antara program dari atas dan program dari bawah. Pembangunan desa tidak terlepas dari pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.

Menurut Kartasmita kegagalan perencanaan disebabkan oleh:

1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, atau perencanaannya sejak semula memang tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah terlaksana.
2. Perencanaan mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya atau rakyat tidak diberi kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukung.
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar Negara berkembang.
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan disini tidak memberikan kesempatan berkembang prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.¹⁹

Dengan memperhatikan hal tersebut berarti perencanaan pembangunan perlu adanya dukungan partisipasi masyarakat untuk menghindari kegagalan pembangunan, begitu juga administrator pembangunan itu dapat mengetahui situasi dan kondisi yang pada akhirnya perencanaan pembangunan itu tidak kaku dan dapat diterima oleh masyarakat. dan kegagalan pembangunan menurut kartasmita disebabkan:

1. Pembangunan hanya menguntungkan golongan masyarakat kecil dan tidak menggantungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrim dirasakan merugikan.
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan menggantungkan rakyat banyak tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu.

¹⁹Kartasmita, **Administrasi Pembangunan**, Jakarta: LP3ES, 1997. Hal. 48-49

3. Pembangunan dimaksudkan mengutungkan rakyat banyak, tetapi rakyat tidak memahami maksud itu.
4. Pembangunan dipahami akan mengutungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikuti sertakan.²⁰

2.4.2. Pelaksanaan

Setelah direncanakan dan ada keputusan bersama , maka pembangunan desa harus dilaksanakan sesuai rencana yang disepakati dan harus dilaksanakan. Ginanjar (Ngusmanto) mengemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa sangat bergantung pada :

- a) Manusia dengan beragam perilakunya.
- b) Faktor dana yang tergantung pada kemampuan keuangan .
- c) Faktor alam yang sulit diramalkan.

Sehingga, agar pelaksanaan pembangunan mencapai hasil yang optimal maka fokus pengawasan perlu diarahkan kepada pemanfaatan ketiga faktor tersebut. Lebih khusus lagi, pengawasan pembangunan lebih menekankan pada pengawasan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan uang untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan.²¹

Gerak dan dinamika pelaksanaan pembangunan di desa, akan tergantung kepada kemampuan administratif pemerintah di desa baik kemampuan pelaksanaan tugas, struktur dan kemampuan lingkungan, yang berpengaruh terhadap tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat desa. Apabila masyarakat telah mengetahui, mengenal sekaligus memahami segala program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa, tentunya masyarakat akan berpartisipasi di dalam pembangunan desa.

2.4.3. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam pelaksanaan suatu tugas, suatu organisasi maupun suatu instansi, banyak hal-hal yang mungkin tidak direncanakan sebelumnya. Dimana hal-hal

²⁰ **ibid**, hal. 56

²¹ Ngusmanto, **Op Cit** . 75

tersebut bisa saja merugikan suatu organisasi seperti halnya tidak terlaksananya suatu tugas, terlambatnya waktu penyelesaian, anggaran yang berlebihan, dan kegiatan lainnya yang menyimpang. Maka dari itu penting rasanya suatu pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan suatu pekerjaan agar memperoleh jaminan bahwa kegiatan serta hasil atau tujuan sesuai dengan yang diinginkan.

pengawasan yaitu pada dasarnya merupakan kegiatan yang memiliki obyek sama, yakni mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Kemudian untuk pengendalian, menurut Steiss bahwa fungsi pengawasan adalah meningkatkan keterganggungjawaban dan keterbukaan padasektor publik. Dari pengetahuan pengawasan dan pengendalian menurut para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa pengawasan dan pengendalian merupakan usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan.²²

Dan tujuan pengawasan Tujuan pengawasan antara lain adalah agar supaya semua kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Dari pengertian diatas kiranya jelas terlihat bahwa ada kaitan langsung antara perencanaan dan pengawasan. Jika dilihat dari prosesnya, maka apabila suatu rencana sedang dilaksanakan serta merta pengawasan diperlukan untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai, menemukan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dan mengambil langkah-langkah perbaikan dalam proses pelaksanaan itu apabila diperlukan, karena untuk mencegah penyimpangan itu merupakan salah satu tujuan pula dari pengawasan.

berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan).²³

²²Ibid hal. 64

²³Kartamista ,OpCit, hal. 65

2.4.4. Jenis Pengawasan

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan yaitu:

- Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern dan ekstern ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan." Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam negeri.

- Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh alasan langsung. Sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, pengawasan represif adalah "pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan." Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana

anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

- Pengawasan Aktif dan pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk "pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan." Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui "penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran." Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah "pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya". Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah "pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

- Pengawasan Formil dan Materil

Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*). Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditunjukkan untuk menghindari terjadinya "korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparaturnya atau pegawai negeri." Dengan dijalankannya pengawasan tersebut

diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat dijalankan sebagaimana direncanakan.

2.4.5. Prinsi-prinsip Pengawasan

Agar fungsi pengawasan mencapai hasil yang diharapkan, maka pimpinan organisasi atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengawasan harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan. prinsip-prinsip pengawasan adalah :

- Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan.
- Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
- Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
- Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).
- Pengawasan harus fleksibel.
- Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
- Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan yang sangat menentukan.
- Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan.

2.5. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan pemerintah didalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan utamayang hendak dicapai. Akan tetapi tidak semua masyarakat dapat menikmati kesejahteraan ,karena manusia memiliki pola kehidupan masing- masing dan untuk memenuhi kebutuhannya mulai dari bekerja dan sebagainya.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.

Menurut Prabawa dalam Rosin kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut Kollé dalam Rosin, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.²⁴

²⁴Rosin, **Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara**, <http://unimed.ac.id/2012/indeks.php/geo>. Hal.58

Untuk itu, Indikator kesejahteraan diatas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebituhan yang lain.

2.6. Defenisi Konsep

Konsep adalah abstrak mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian , maka dalam merumuskan kita harus dapat menjelaskan sesuai dengan maksud yang dipakai.

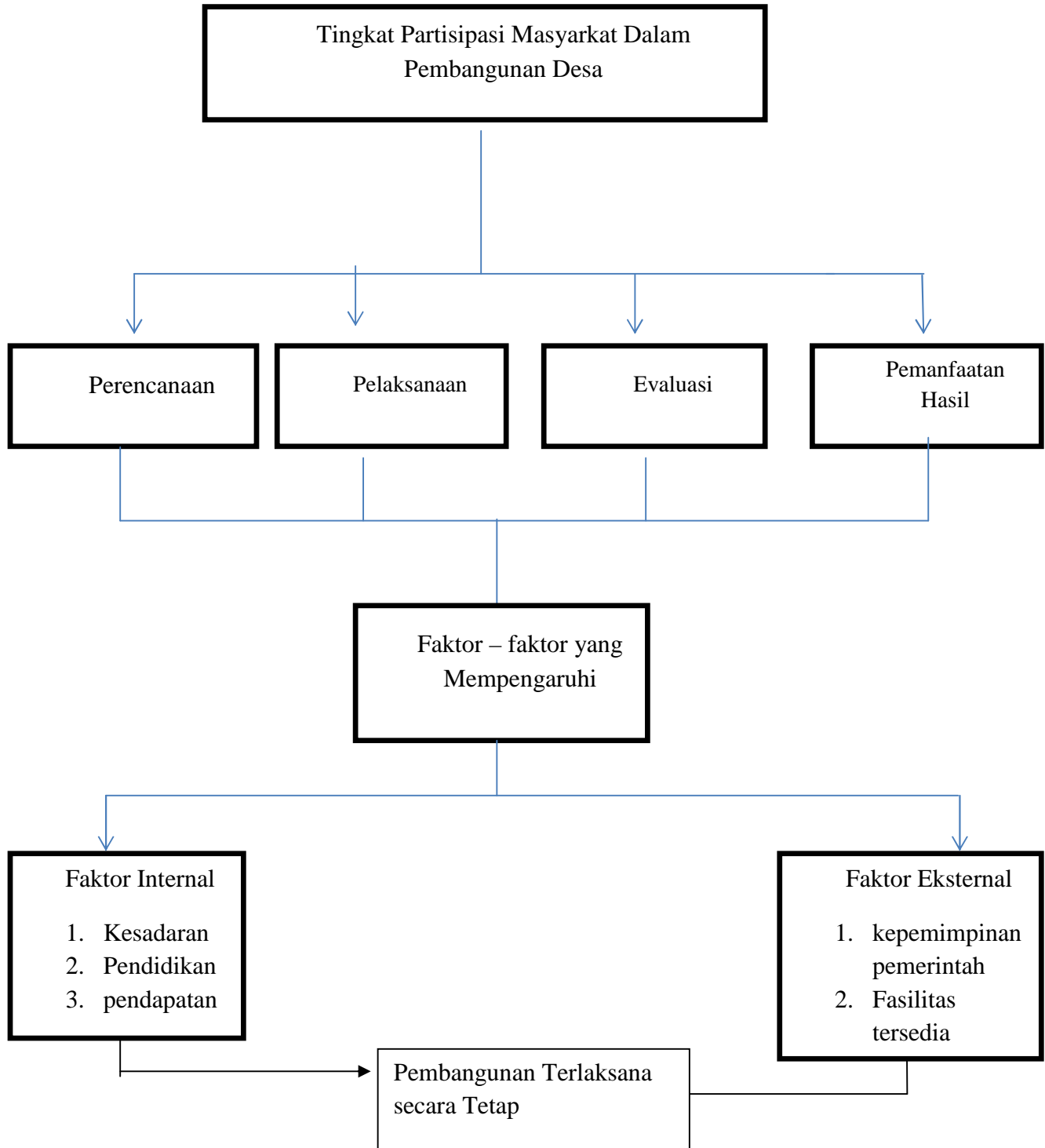
1. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat langsungmaupun tidak langsung melalui gagasan atauide dalam penyusunan program pembangunan, pelaksanaan, serta evaluasi untuk perubahan yang direncanakan dan pertumbuhan menuju perbaikan yang diinginkan.
2. Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasi masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.
3. Kesejahteraan masyarakat adalah Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang

dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.

2.7. Kerangka Berpikir

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di lihat dari perencanaan , bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti perencanaan atau memberikan saran atau ide . Pelaksanaan , bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pembangunan, Evaluasi, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam menilai dan memberikan saran setelah pembangunan dilakukan, dan Pemanfaatan Hasil, bagaimana partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pembangunan tersebut .dan faktor yang mempengaruhi Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pemanfaatan Hasil terlihat dari dua (2) Faktor , yaitu Faktor Internal dimana faktor tersebut meliputi Kesadaran, Pendidikan, dan Pendapatan. Dan Faktor yang kedua yaitu Faktor Eksternal yaitu Kepemimpinan Pemerintahan dan Fasilitas yang tersedia. Dan jika faktor kedua tersebut terlaksana maka pembangunan terlaksana secara tepat

Gambar : 2.1. Kerangka Berpikir Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Untuk Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Secara umum bentuk penelitian ada (2) yaitu bentuk kuantitatif dan kualitatif .sesuai dengan pendapat Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori (theories) tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Oleh karena itu metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif di artikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas dan tentang apa yang sedang diteliti yang menjadi pokok permasalahan.²⁵

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, penulis melakukan pengambilan data langsung di Desa Simbara Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan.dan waktu penelitian dimulai pada tanggal 6 September sampai tanggal 12 September 2020.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajian tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan setempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Oleh karena itu peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Untuk Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Simbara Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan

Yang menjadi informan penelitian ini adalah :

²⁵ Jhon W Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, Edisi Ketiga, Hal. 4

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Simbara.
2. Informan utama, dalam hal ini yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu Masyarakat Desa Simbara Kecamatan Tarabintang ,dimana Desa Simbara yang memiliki tiga Dusun yakni

Table 3.1. Informan Utama

No	Nama Dusun	Jumlah Informan utama
1.	Dusun Uruk Ambasang	3 orang
2.	Dusun Simbara	2 orang
3.	Dusun Muara	3 orang

Sumber : masyarakat Desa Simbara

3.4.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara kualitatif, penulis dapat melakukan wawancara berhadapan dengan partisipan atau mewawancarai mereka dengan telepon. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (unstructured)

dan bersifat terbuka (open ended) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dan para partisipan.

2. Dokumen-dokumen kualitatif, selama proses penelitian, penulis juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen public (seperti Koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat, e-mail).
3. Observasi, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mengamati dan mencatat segala sistematika gejala-gejala yang diselidiki. Jadi observasi ini digunakan untuk mengamati proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Materi Audio dan visual, data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi.

3.5. Teknik Analisis Data

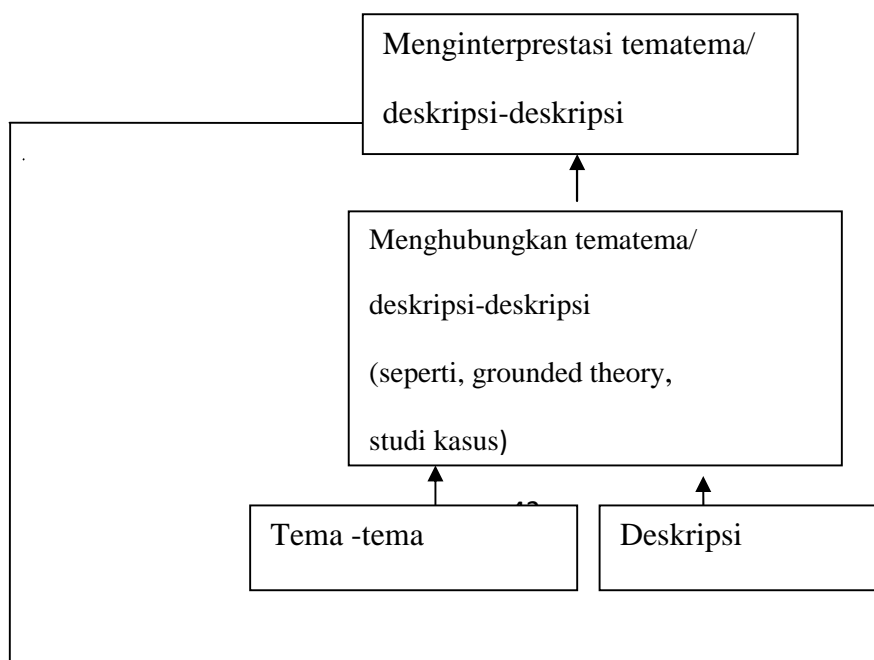
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

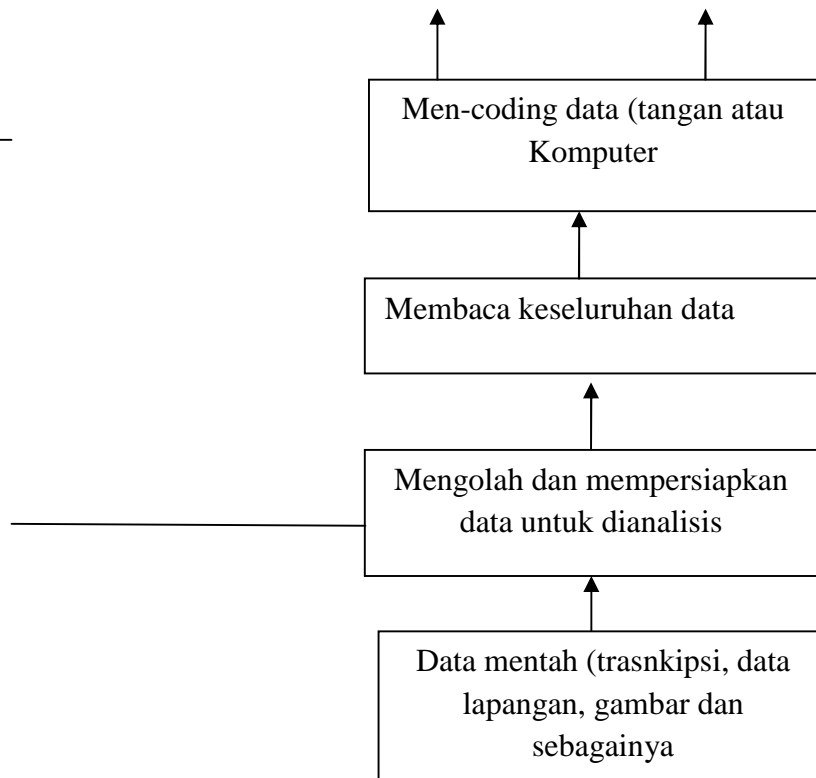
1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini transkripsi wawancara men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf).
4. Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “Pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.

Gambar 3.1. Teknik Analisis Data



mvalidasi
kuratan informasi



Sumber : Jhon w. Cresweel. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif ,kuantitatif, dan Campuran. Edisi Empat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016